

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU.

- Al Rashid, Harum, 1986, *Sekilas Tentang Jual Beli Tanah (Berikut Peraturan-Peraturannya)*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Brouwer, J.G., dan Schilder, 1998, *A Survey of Dutch Administrative Law*, Nijmegen: Ars Aequilibrari.
- Budiardjo, Miriam, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Djoko Prakoso dan Budiman Adi Purwanto, 1985, *Eksistensi Prona sebagai Pelaksanaan Mekanisme Fungsi Agraria*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Effendi, Bachtiar, 1993, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya*, Alumni, Bandung, 1993.
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Harsono, Boedi, 2003, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Hasan Basri Nata Menggala dan Sarjita, 2005, *Pembatalan Dan Kebatalan Hak Atas Tanah*, Tugujogja Pustaka.
- Kelsen, Hans, 2011, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung.
- Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah: Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2006, 2007, Jakarta, Media Makmur Majumandiri.
- Mahmud Marzuki, Peter, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta.
- Masyhur, Kahar, 1985, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta
- Parlindungan, AP., 1989, *Bunga Rampai Hukum Agraria Serta Landreform*, Bagian I, Bandung

- Perangin, Effendi, 1994, *Hukum Agraria di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Santoso, Urip, 2011, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta \
- Sarjita, 2005, *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, Tugujogja Pustaka, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta.
- Soemarjono, Maria S.W., 2001, *kebijakan pertanahan antara Regulasi & Implementasi*, Kompas, Jakarta.
- Soetomo, 2000, *Pedoman Jual Beli Tanah Peralihan Hak dan Sertipikat*, Universitas Brawijaya.
- Sofwan Husen, Ali, 1997, *Konflik Pertanahan*, PT. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Syahrani, Riduan, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung
- Van Apeldoorn, J, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita cetakan 26, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13/SE/VIII/2015 tentang Layanan 70-70.

C. MAKALAH.

Chaerudin, H, 1999, *Filsafat Suatu Ikhtisar*, FH UNSUR, Cianjur.

M. Hadjon, Philipus, *Tentang Wewenang*, Makalah Universitas Airlangga, Surabaya.

Mohamad Faiz, Pan, 2009, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volue 6 Nomor 1.

Soelarman Brotosoelarno, “Aspek Teknis dan Yuridis Pendaftaran Tanah Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 1997”, (b) (makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kebijakan Baru Pendaftaran Tanah dan Pajak-Pajak Tanah Terkait : Suatu Proses Sosialisasi dan Tantangannya, Yogyakarta.

Syafrudin, Ateng, 2002 *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung.

D. WEBSITE

www.bpn.go.id.

<http://asriman.com/tata-cara- pengecekan-sertifikat-dan-persyaratannya/>